

Analisis Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya

Aram Palilu¹, Joseph E. Lopulalan², Frety Matahelumual³,
Wiesje Ferdinandus⁴, Udin Wenda⁵

Universitas Victory Sorong
Email: ¹arampalilu1015@gmail.com*

Abstrak

Pengelolaan sampah harus dikelola secara profesional agar tidak mempengaruhi kualitas kehidupan (kesehatan) manusia dan pencemaran lingkungan seperti dapat menimbulkan pemandangan yang tidak elok, bau aroma yang tak sedap, dapat menimbulkan berbagai penyakit bagi masyarakat, dapat menjadi penyebab banjir dalam kota dan kinerja perekonomian masyarakat menjadi tidak maksimal. Adapun fokus dari penelitian adalah pengelolaan sampah oleh Dinas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPPL), dan rumusan masalah penelitian adalah bagaimanakah deskripsi pengelolaan sampah oleh DPPL di Kota Sorong? Sedangkan tujuan penelitian ini, yaitu ingin mengetahui deskripsi pengelolaan sampah oleh DPPLH Kota Sorong. didalam penelitian ini, menggunakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dipakai meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Penentuan sampel berdasarkan *purposive* sampling dengan jumlah 8 orang. Sedangkan teknik analisis data yang diterapkan melalui model Miles dan Hubermann yang meliputi analisis domain, taksonomi, dan komponensil. Proses analisisnya adalah data reduction, data display dan verification. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pertama: pengelolaan sampah yang dilakukan oleh DPPLH di Kota Sorong, meliputi: 1) pemilahan sampah, 2) pengumpulan sampah, 3) pengangkutan sampah, 4) pengolahan sampah, dan pemrosesan akhir sampah. Kedua: pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh DPPLH Kota Sorong, belum maksimal karena terkendala dengan terbatasnya anggaran yang didapatkan dari pemerintah.

Kata Kunci: Pengelolaan Sampah, Jenis Sampah, TPS, TPA, DPPL.

Analysis Of Waste Management By The Service Of Environmental Protection And Management Sorong City, Southwest Papua Province

Abstract

Waste management must be managed professionally so that it does not affect the quality of human life (health) and environmental pollution, such as causing unsightly views, unpleasant odors, can cause various diseases in the community, can be the cause of flooding in the city and the economic performance of the community. not optimal. The focus of the research is waste management by the Environmental Protection and Management Service (DPPL), and the research problem formulation is what is the description of waste management by the DPPL in Sorong City? Meanwhile, the aim of this research is to find out a description of waste management by the Sorong City DPPLH. In this research, qualitative research was used. Data collection techniques used include observation, interviews and documentation. Determination of the sample was based on purposive sampling with a total of 8 people. Meanwhile, the data analysis technique applied is through the Miles and Hubermann model which includes domain, taxonomy and component analysis. The analysis process is data reduction, data display and verification. The research results show that, First: waste management carried out by DPPLH in Sorong City, includes: 1) waste sorting, 2) waste collection, 3) waste transportation, 4) waste processing, and final waste processing. Second: the waste management carried out by the Sorong City DPPLH is not optimal because it is hampered by the limited budget obtained from the government.

Keywords: Waste Management, Types of Waste, TPS, TPA, DPPL.

1. PENDAHULUAN

Intensitas pembangunan yang maju pesat di kota-kota besar, seperti di Kota Sorong tentu bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tersedianya prasarana dan sarana serta pelayanan publik yang semakin maksimal. Tujuan tersebut adalah sesuatu yang diharapkan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun oleh masyarakat.

Akibat pembangunan yang terus berlangsung dan capaian tujuan yang semakin baik dari waktu ke waktu maka Kota Sorong sejak tahun 2022 telah beralih kedudukan menjadi Ibukota Provinsi Papua Barat Daya dan terus berusaha dalam meningkatkan pembangunan untuk mewujudkan citra dirinya sebagai salah satu kota yang berkembang pesat. Upaya peningkatan citra Kota Sorong ditandai dengan perubahan statusnya sebagai pusat pemerintahan sebuah provinsi, gerbang masuk provinsi Papua Barat Daya, tetapi juga menjadi tolak ukur perkembangannya sebagai sebuah kota yang berkembang. Alasan inilah maka pusat pemerintahan dipindahkan ke Kota Sorong, sehingga membawa pertambahan jumlah penduduk yang cukup signifikan.

Sebagai Ibukota Provinsi Papua Barat Daya dan sekaligus Kota Sorong maka tidak bisa dipungkiri bila terjadi peningkatan pemukiman atau perumahan penduduk, pusat perkantoran, pusat bisnis atau perdagangan/pasar tradisional dan industri-industri yang ada di area pengembangan Kota Sorong yang membentang dari kawasan kilometer 4 hingga kilometer 18. Konsekuensi dari semua ini maka selalu punya hubungan linear dengan sumber timbulan sampah terbesar di berbagai tempat/lokasi, seperti tempat pembuangan sampah di tempat yang tidak dianjurkan/liar (lahan kosong/open dumping), Tempat Pembuangan Sampah (TPS), kontainer sampah dan di tempat pembuangan sampah lainnya (tempat pembakaran sampah) mandiri masyarakat didalam pemukiman masyarakat di Kota Sorong. Timbulan sampah terus meningkat dari waktu ke waktu seiring dengan peningkatan penduduk secara tidak terkendali.

Dari hasil studi pendahuluan melalui pengamatan, ternyata masyarakat Kota Sorong belum mempunyai lokasi pengelolaan sampah sehingga masyarakat membuang sampah secara serampangan atau melakukan pemusnahan dengan cara melakukan pembakaran di kompleks perumahan atau di lahan yang masih kosong. Kebiasaan membuang sampah, tidak ada pemilahan sampah terlebih dahulu berdasarkan jenis-jenis sampah yang harus dilakukan.

Akhirnya pembuangan sampah oleh masyarakat di setiap TPS sehingga muncullah tumpukkan atau timbunan yang melebihi kapasitas TPS yang ada. Karena itu, perlu ada pengenalan maupun penggunaan 3 (tiga) prinsip yang meliputi: reduce, reuse, recycle (pengurangan, penggunaan kembali dan daur ulang sampah) sebagai upaya pendekatan sumber didalam pengelolaan sampah. Dengan demikian, masyarakat ada kesadaran untuk mengelola sampah sehingga memiliki nilai ekonomis daripada sekedar buang sampah saja.[1]

Beranjak dari permasalahan tersebut, Pemerintah Kota dituntut untuk dapat mengatasi permasalahan ini sebaik-baiknya, maka pemerintah Kota Sorong melalui instansi teknisnya, Dinas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPPLH) Kota Sorong telah mengambil tindakan untuk mengatasi permasalahan timbunan atau tumpukkan sampah yang semakin hari semakin banyak terdapat dalam Kota Sorong. Langkah yang ditempuh DPPLH dalam mengatasi permasalahan timbunan dan penumpukkan sampah adalah fokus pada kebijakan pengelolaan sampah secara efektif di Kota Sorong.

Adapun fokus dalam penelitian ini adalah deskripsi kebijakan pengelolaan sampah oleh Dinas DPPLH di Kota Sorong. Dari fokus penelitian maka, pertanyaan yang diajukan dalam penelitiannya bagaimanakah deskripsi pengelolaan sampah yang dilakukan oleh DPPLH di Kota Sorong? Berdasarkan pertanyaan penelitian ini maka tujuan daripada penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengelolaan sampah oleh DPPLH di Kota Sorong.

Peningkatan penimbunan dan/atau tumpukkan sampah di lingkungan pemukiman masyarakat bila tidak ditangani dengan baik, akan mempengaruhi kualitas kehidupan (kesehatan) manusia dan pencemaran lingkungan seperti dapat menimbulkan pemandangan yang tidak elok, bau aroma yang tak sedap, dapat menimbulkan berbagai penyakit bagi masyarakat, dapat menjadi penyebab banjir dalam kota dan aktivitas atau kinerja perekonomian masyarakat menjadi tidak maksimal.

Berdasarkan permasalahan sampah diatas, bila tidak ada langkah konkrit dari berbagai pihak, khususnya pemerintah Kota Sorong maka tentu menimbulkan masalah lanjutan yang akan berdampak lebih luas. Karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti dengan merumuskan judul sebagai berikut: “Analisis Kebijakan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya.”

2. METODE

metode kualitatif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan sampah oleh Dinas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPPLH) Kota Sorong. Penentuan sampel secara purposive sampling. Total sampel yang diambil adalah 8 orang, yaitu Kepala Bidang Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau, Kepala Seksi Pengangkutan Sampah, petugas Persampahan Kota Sorong sebanyak 3 orang, dan masyarakat sebanyak 3 orang.

Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terkait dengan langkah-langkah yang ditempuh terkait prasarana dan sarana pengangkutan sampah oleh DPPL Kota Sorong dan tanggapan petugas pengangkutan sampah terhadap kebiasaan masyarakat membuang sampah di TPS. Sedangkan Dokumentasi difokuskan ketersediaan alat penampung sampah berupa bengkel, truk sampah, arm roll, jumlah TPS dan TPA. Observasi dilakukan terhadap pembuangan atau pengumpulan sampah, tumpukan sampah di pemukiman masyarakat dan kegiatan pemusnahan sampah mandiri oleh masyarakat, dan proses pemilahan sampah.

Teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah model Miles & Huberman.[11] Proses analisis data dilakukan mulai dari pengumpulan sampah oleh masyarakat, ketersediaan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), prasarana dan sarana pengangkutan, proses pemilahan sampah, pemusnahan pembakaran dan pengangkutan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun proses proses pengolahan sampah yang terjadi di Kota Sorong oleh DPPL, meliputi:

a. Pemilahan (Pewadahan) Sampah

Pemilahan atau pewadahan sampah ditangani berdasarkan jenis sampah, yakni sampah organik dan anorganik serta sampah yang mengandung zat kimia yang beracun dari rumah tangga/industri.

Kenyataannya yang ada dari hasil observasi menunjukkan bahwa sampah yang menumpuk di semua TPS yang ada di kompleks masyarakat atau Kota Sorong belum dilakukan pemilahan sampah sebelumnya sesuai dengan jenis sampah. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara yang dari para petugas sampah di beberapa TPS yang sedang mengangkut sampah ke truk sampah. Pertanyaan yang diajukan bahwa apakah

masyarakat sebelum membuang sampah telah dipilah-pilah sesuai jenis sampahnya untuk dibuang di TPS?

Jawaban petugas sampah di TPS Distrik Sorong Barat, bahwa: “Masyarakat asal buang sampah saja. Dong tidak kasih pisah-pisah, bahkan berserakan saja di TPS ini.” Selanjutnya jawaban yang relatif sama di TPS Distrik Timur, bahwa: “Yang buang sampah disini tahunya bawa, tidak pernah sampahnya dikelompokkan sesuai anjuran aturan. Pokoknya datang bawa dan buang, itu saja yang dilakukan oleh mereka.”

Jawaban petugas pengangkut sampah tersebut, kemudian ditanyakan kepada masyarakat yang buang sampah di beberapa TPS: mengapa membuang sampah tidak dipilah sebelumnya? Jawaban mereka senada bahwa “Di TPS ini kan tidak tersedia tempat khusus untuk jenis-jenis sampah, ya akhirnya kita buang sampah digabung saja. Berdasarkan informasi dari para informan, kemudian dikonfirmasi ke pihak pimpinan DPPLH, dikatakan bahwa: “kami saat ini terbatas dengan anggaran yang diperoleh dari pemerintah, jadi tolong dipahami bagi kita semua.”

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa masyarakat saat membuang sampah di setiap TPS yang ada dalam Kota Sorong belum melakukan pemilahan sampah terlebih dahulu berdasarkan jenis sampah. Hal ini terjadi karena masyarakat sendiri menyadari bahwa tempat/kontainer pemilahan sampah di TPS juga belum ada. Tidak adanya tempat/kontainer di TPS untuk tempat pembuangan sampah sesuai jenis sampah disebabkan pemerintah/DPPLH Kota Sorong terkendala dengan anggaran yang dimiliki adalah terbatas.

b. Pengumpulan Sampah

Adapun pola pengumpulan sampah di Kota Sorong, yang biasanya terjadi adalah:

1) Pola individual langsung

Pada umumnya individu yang kemampuan ekonominya baik (ekonomi menengah) secara mandiri menyediakan tempat khusus untuk pengumpulan sampah dimasing-masing rumah, setelah dianggap cukup banyak, lalu secara individual pula diangkut dengan pengangkutan pribadi untuk dibawa ke TPA. Masyarakat secara individual ini pada umumnya yang berada di sekitar koridor jalan primer dan sekunder. Hasil konfirmasi melalui wawancara bahwa mereka lakukan pengumpulan dan pengangkutan sampah ke TPA secara mandiri karena terbatasnya TPS yang dekat dengan kompleks pemukiman mereka.

2) Pola individual tidak langsung

Hasil observasi menunjukkan bahwa tingkat partisipasi perorangan masih sangat rendah dalam pengelolaan sampah. Secara individual melakukan pengumpulan atau pembuangan sampah dari rumah, lalu diangkut dengan menggunakan gerobak/motor ke TPS terdekat atau pun ke lahan kosong yang tersedia (sementara belum difungsikan). Langkah akhirnya akan diangkut dengan truk pengangkutan oleh petugas sampah ke TPA.

3) Pola komunal langsung

Didalam penanganan/pengeolaan sampah, ada beberapa kelompok/komunal masyarakat Kota Sorong yang kesadarannya cukup tinggi sehingga tidak serta-merta permasalahan sampah diserahkan kepada pemerintah saja. Hal ini juga karena berbagai keterbatasan personil dan alat angkut, khusus oleh pihak pemerintah. Masyarakat/komunal secara mandiri menyediakan wadah/lokasi bersama sebagai TPS, selanjutnya secara mandiri diangkut oleh alat pengangkutan untuk dibawa ke TPA. Hasil konfirmasi dari komunal ini, bahwa dikompleks mereka jauh dari TPS, sehingga mengambil inisiatif untuk mengumpulkan dan mengangkut sampah secara mandiri dengan alat pengangkutan komunal.

4) Pola komunal tidak langsung

Kelompok masyarakat ini ada kesadaran tinggi mengenai masalah persampahan. Komunal ini menyediakan wadah komunal sebagai tempat pengumpulan sampah dan bila tumpukkan sampah sudah banyak, maka akan diangkut ke lahan yang telah disediakan. Dari lahan inilah, kemudian akan diteruskan pengangkutannya oleh petugas sampah ke TPA.

Hasil konfirmasi dari mereka, mengatakan bahwa TPS di sekitar pemukiman mereka belum ada. Karena itu, solusi yang ditempuh adalah menyediakan lahan sementara secara mandiri sebagai tempat penumpukan atau pengumpulan sampah.

c. Pengangkutan Sampah

Pengangkutan sampah akan maksimal dan efektif bila ditopang dengan prasarana dan sarana yang tersedia, terutama yang dimiliki oleh DPPLH Kota Sorong. Dengan memaksimalkan kapasitas kendaraan pengangkutan yang digunakan maka permasalahan sampah yang ada di Kota Sorong dapat diatasi seminimal mungkin.

Tabel 1
Jumlah Petugas Kebersihan Kota Sorong

Peralatan Angkut	Jumlah (Unit)	Volume Sampah (Ton) / Hari
Truk Sampah	17	187

Sumber: Hasil Olahan Data, 2024

Berdasarkan data pada Tabel 1 diatas, maka perbandingan antara peralatan pengangkutan dengan volume sampah sebanyak 197 ton per hari, dapat dikatakan bahwa 1 unit truck per hari harus mengangkat sampah adalah 11,588 ton. Per hari, kemampuan 1 unit truck untuk mengangkut sampah ke TPA hanya berkisar antara 8 – 9 ton per hari. Dengan demikian, harus ada penambahan 5 truck pengangkut sampah lagi. Hasil konfirmasi melalui wawancara dari salah satu pimpinan di DPPLH, bahwa adanya kekurangan truck pengangkutan karena keterbatasan anggaran oleh pemerintah Kota Sorong, sehingga berpengaruh terhadap belum maksimalnya pengangkutan sampah ke TPA.

Hal lain yang perlu perhatian terkait dengan jumlah personil persampahan di DPPLH adalah seperti yang tertera pada tabel dibawah ini:

Tabel 2
Jumlah Petugas Kebersihan Kota Sorong

No.	Petugas Kebersihan	Jumlah Petugas Kebersihan
1	Bengkel	4
2	Truk Sampah	80
3	Arm Roll	10
4	Tempat Pembuangan Akhir	3
5	Tempat Pembuangan Sementara	-
Jumlah		97

Sumber: DPPLH Kota Sorong, 2024

Data diatas bila dibandingkan dengan volume sampah yang berkapasitas per hari sebanyak 197 ton, maka seorang petugas sampah harus mampu mengangkut sampah per hari adalah 2,03 ton. Hal ini mustahil mampu dilakukan oleh seorang petugas sampah, kecuali harus menambah personil petugas sampah yang proporsional dengan kapasitas sampah 197 ton per hari.

Walaupun demikian pemerintah melalui DPPL telah berupaya keras agar pengangkutan sampah menjadi lancar dengan memaksimalkan keterbatasan yang dimiliki, baik keterbatasan personel maupun prasarana dan sarana penampungan dan alat pengangkutan yang ada. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa pengangkutan sampah yang kurang lebih 197 ton yang ada di setiap TPS walaupun daya kapasitas berlebihan untuk diangkut ke TPA adalah belum maksimal.

d. Pengolahan sampah

Adapun pengolahan sampah itu sendiri sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, adalah: kegiatan

daur ulang materi, maupun pemadatan pengomposan, termasuk cara mengubah sampah menjadi sumber energi.

Masyarakat di Kota Sorong dikategorikan dengan 2 (dua) wilayah yaitu sorong daratan dan sorong kepulauan. Penanganan dan pengelolaan sampah telah diatur dalam Perda Kota Sorong No. 15 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah. Untuk di Kota Sorong maka penanganan/pengelolaan sampah hanya dilakukan di Sorong daratan yang meliputi wilayah pelayanan 9 Distrik, dimana jumlah TPS ada 73 unit. Sedangkan di wilayah Distrik Sorong Kepulauan tersedia 8 TPS.

Di Kota Sorong proses pengelolaan sampah tidak dilakukan oleh masyarakat. Sumber sampah dari masyarakat yang tinggal di wilayah Sorong Daratan, baik berupa sampah organik dan/atau anorganik, pada umumnya langsung ditumpuk ke TPS ataupun kontainer, bak sampah maupun non TPS. Di TPS ini biasanya dilakukan pemusnahan dengan cara dibakar, ditimbun bahkan melakukan pembuangan sampah di sembarangan tempat: dibuang ke sungai, ditumpuk di jalan dan lahan yang kosong.

Permasalahan pokok belum maksimalnya pengolahan sampah karena prasarana/smelter yang belum ada di Kota Sorong, sehingga menjadi kendala utama untuk mendaur ulang sampah sehingga memiliki nilai ekonomis, termasuk cara mengkonversi sampah sebagai sumber energi, dan khusus untuk sampah plastik dapat dijadikan sebagai bahan campuran pengaspalan jalan setelah melalui proses perubahan lanjutan.

e. Pemrosesan akhir sampah

Kegiatan pemrosesan akhir sampah dilakukan dengan menggunakan metode lahan urug terkendali, metode lahan urug saniter serta teknologi ramah lingkungan. Tempat pemrosesan akhir sampah di Kota Sorong yang berlokasi di jalan poros Sorong-Makbon Kelurahan Giwu Distrik Klaurung, dimana letaknya cukup jauh dari pusat Kota Sorong ke TPA yang berjarak 20 Km dan waktu yang dibutuhkan sekitar 40 menit untuk tiba di lokasi TPA. Adapun TPA tersebut adalah seluas 10 hektar are (Ha), namun luas lahan yang baru difungsikan adalah 3,5 Ha. Lokasi TPA tersebut telah difungsikan pada tahun 2000 hingga sekarang ini. Di TPA tersebut, penanganan pemrosesan dan/atau pengolahan sampah dengan menerapkan open dumping system, dimana sampah yang didatangkan dari pusat Kota Sorong, hanya dibuang, ditumpuk dan dibakar dilahan yan tersedia dengan tidak ada pemrosesan berikutnya yang berguna bagi kemaslahatan manusia dan sebagai faktor pendukung dalam pembangunan.

4. KESIMPULAN

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa:

- a. Pengelolaan sampah yang dilakukan oleh DPPLH di Kota Sorong, meliputi: 1) pemilahan sampah, 2) pengumpulan sampah, 3) pengangkutan sampah, 4) pengolahan sampah, dan pemrosesan akhir sampah.
- b. Pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh DPPLH Kota Sorong, belum maksimal karena terkendala dengan terbatasnya anggaran yang didapatkan dari pemerintah.

5. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Rapii, Muhammad, dkk. 2021. Pengelolaan Sampah Secara Terpadu Berbasis Lingkungan Masyarakat Di Desa Rumbuk. *DharmaRaflesia Jurnal Ilmiah Pengembangan dan Penerapan IPTEKS* Vol. 19, No. 01, Juni, 2021, pp. 13-22
- [2] Budi. Winarno, 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses, Revisi*, Yogyakarta: Media Pressindo, ISBN -979-222-207-3
- [3] Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : CV Alfabeta.
- [4] Tangkilisan Hessel Nogi , 2003, “Teori dan Konsep Kebijakan Publik” (dalam *Kebijakan Publik yang Membumi, konsep, strategi dan kasus*), Lukman Offset dan YPAPI, Yogyakarta.
- [5] Mahyudin, Rizqi Puteri. 2014. *Strategi Pengelolaan Sampah Berkelanjutan*. Fakultas Teknik Prodi Teknik Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat, *EnviroScienceae* 10 33-40 ISSN 1978-8096.
- [6] Islamy, Irfan. 2009. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*. Bumi Aksara : Jakarta.
- [7] Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
- [8] Nugroho, Panji. 2013. *Buku Panduan Membuat Pupuk Kompos Cair*.
- [9] Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- [10] Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah

- [11] Sugiyono. 2009. Memahami Penelitian Kualitatif, Alfabeta, Bandung.